

JAMINAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI DIFABEL Diharapkan Dapat Sekolah di Dekat Rumah

YOGYA (KR) - DPRD DIY saat ini sedang melakukan pembahasan Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Raperda ini sendiri merupakan revisi Perda tentang disabilitas yang sebelumnya sudah ada.

Salah satu klausul yang akan ada dalam Raperda, akan dimasukkan tentang jaminan pendidikan khusus (Jamdiksus). Jika sebelumnya di DIY telah memiliki Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), nantinya akan memiliki Jamdiksus.

"Jamkesus kita mendapatkan apresiasi dari pusat. Karena sebelumnya belum ada provinsi yang memiliki perhatian khusus bagi penyandang disabilitas. Kali ini, kita akan ada Jamdiksus yang diharapkan DIY benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas," ujar Ketua Pansus Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas M Yazid dalam pembahasan yang juga di-

hadiri sejumlah organisasi penyandang disabilitas di DIY, Senin (29/11).

Sebelumnya DIY telah memiliki Perda Nomor 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut memasukkan adanya perlindungan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas dan langsung menjadi rujukan bagi provinsi lain di Indonesia.

Jamdikus tersebut disambut positif oleh organisasi penyandang di DIY. Mengingat selama ini, banyak anak-anak difabel sulit mengakses pendidikan. Terutama ketika mau sekolah di dekat mereka, dengan alasan sekolahnya tidak menyelenggarakan pendidikan inklusi. Meskipun mereka

mengaku baru mendengar tentang wacana tersebut. "Terus terang kami juga baru tahu hari ini. Namun jika memang benar-benar ada, harapannya ada jaminan semua difabel di DIY dapat sekolah di mana pun mereka mau sekolah. Termasuk mengakses sekolah hingga mendapatkan akomodasi," ungkap Syamsudin selaku koordinator Koalisi Organisasi Untuk Advokasi Difabel DIY.

Menurutnya, bagaimana pendidikan untuk terjangkau bagi semuanya masih menjadi kunci utama. Contohnya, bagaimana anak difabel dapat sekolah di dekat rumah mereka. Termasuk mendapatkan fasilitas *assessment profile* yang tepat. Agar tidak ada alasan sekolah menolak calon siswa yang disabilitas.

Saat ini banyak anak difabel yang tidak sekolah, salah satunya karena tidak adanya akomodasi. Dimana orangtua yang anaknya difabel harus memilih salah satu. Bekerja atau mengantar jemput anaknya ke sekolah. (Awh/Bro)-d

'Kawula Mataram Jogja' Dukung Anies Baswedan Capres 2024

YOGYA (KR) - Dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2024 semakin menguat. Di Yogyakarta, elemen warga yang tergabung dalam 'Kawula Mataram Jogja' mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan menjadi Presiden RI.

Deklarator Anies For Presiden, Antok Listiyanto yang juga anggota Kawula Mataram menyampaikan, sosok Anies sudah dekat di masyarakat Yogyakarta. Sejak masa kuliah di UGM, Anies dikenal sangat ber-rinsip. "Rekam jejak Anies Baswedan bersih dan memiliki kekuatan menghadapi berbagai persoalan bangsa. Itu yang membuat kami yakin," terang Antok kepada wartawan di sela acara deklarasi, Minggu (28/11).

Deklarasi dukungan tersebut diikuti oleh pu-



KR-Istimewa

Deklarasi Kawula Mataram Jogja mendukung Anies Baswedan Capres 2024.

luhan peserta dengan berpakaian adat Jawa. Di sela deklarasi diisi pembacaan puisi dukungan kepada Anies Baswedan. Kawula Mataram Jogja memiliki elemen kawula alit yang terdiri dari berbagai profesi seperti kuli kayu, pedagang, tukang becak, buruh, tukang karyawan yang juga memberikan dukungan serupa.

Menurut Antok, sosok pemimpin baik dan bijak-

sana, sangat terlihat saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hampir semua program-program yang dijanjikan terlaksana dengan baik. Anies juga sangat akrab dan bersahabat dengan warganya, terutama rakyat kecil. "Kami akan bersinergi dengan semua elemen masyarakat agar kita dapat bersama-sama mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden," pungkasnya. (Dev)-d

PSIM

nilai sama 16, namun PSCS unggul *head to head*, mengingat di pertemuan pertama meraih kemenangan 1-0 dan di pertemuan kedua bermain imbang 1-1.

Sedangkan bagi Persis, kekalahan itu tidak berpengaruh pada posisi mereka. Sebelumnya 'Laskar Sambemnyawa' yang mengantongi nilai 20, sudah memastikan lolos ke babak delapan besar sebagai juara Grup C.

PSCS yang butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak delapan besar, tampil agresif dengan serangan cukup gencar. PSCS membuka peluang melalui pergerakan Ismail Haris yang diakhiri tembakan keras ke arah gawang

lawan, namun masih bisa diantisipasi kiper Pancar Nur Widiastono. Begitu pula peluang PSCS melalui Afrizhan dan Kasim Botan belum membuahkan hasil.

Persis yang berangsur keluar dari tekanan, membalas ancaman melalui aksi Ferdinand Sinaga, namun juga gagal diselesaikan. Persis kemudian membuat perubahan dengan memasukkan Heri Susanto dan Shulton Fajar menggantikan Yu Hyun Koo dan Miftahul Hamdi. Namun justru PSCS yang memecah kebuntuan pada pengujung babak pertama melalui gol Kasim, berawal dari sepak pojok.

PSCS menggandakan keunggulan

Sambungan hal 1

pada menit 61 melalui bidikan Ismail Haris. Persis merespons kebobolan dengan memasukkan Alberto 'Beto' Goncalves menggantikan Ferdinand Sinaga. Lima menit berada di lapangan, Beto berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas untuk memperkecil ketinggalan. Wasit memberikan tendangan bebas setelah Rivaldi Bawuo dilanggar keras Rendy Saputro. Wasit pun mencabut kartu merah untuk Rendy. Namun Persis tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan PSCS mampu mempertahankan kemenangan 2-1 hingga laga usai. (Jan)-d

Jalur

sepanjang 63 km dari Kapanewon Temon hingga Kapanewon Kalibawang. Tapi setelah disurvei dan dicermati lagi ternyata berkurang, ada titik-titik wilayah yang bisa dipotong kompas sehingga panjangnya hanya 53 km, penghematan 10 km.

Bupati berharap koran tertua di nusantara ini tetap berada di rel yang ada. "Sampai saat ini kami menilai KR masih on the track. Artinya tidak terkontaminasi kepentingan-kepentingan sesaat yang bisa mencederai per-

juangan dan pengabdian para pendiri KR," tuturnya.

Karena itu pihaknya ikut menjaga supaya KR tetap pada komitmen ketika perusahaan media ini didirikan dulu. "Keberadaan media termasuk KR sangat kita butuhkan dalam mensukseskan program-program pembangunan daerah," tegasnya.

Diput KR, Wirmon Samawi mengungkapkan, audiensi upaya menjaga tali silaturahmi antara manajemen KR dengan kepala daerah di empat kabupaten satu

Sambungan hal 1

kota di DIY, termasuk dengan Bupati Sutedjo dan Wabup Fajar Gegana. "Semenjak bupati Pak Sutedjo menggantikan Pak Hasto baru sekarang kita bisa *audiensi*. Harapan kami ke depan semakin harmonis hubungan kemitraan kita," ujarnya.

Dalam menjalankan misi KR berslogan *mi gunani tumrapping liyan* media ini akan selalu mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Kulonprogo tanpa mengabaikan sikap kritis yang bersifat membangun. (Rul)-d

'Learning Loss'

Michelle Kaffenberger, seorang peneliti dari Universitas Oxford, Inggris, menengarai, *learning loss* merupakan kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara. Menurut Kaffenberger, dampak *learning loss* tidak akan berhenti, meskipun sekolah dibuka dan diadakan pembelajaran tatap muka. Hal itu diperparah lagi jika pihak sekolah tidak memiliki kebijakan pemulihan kemampuan belajar terlebih dahulu.

Berdasarkan riset yang dilakukannya, Kaffenberger memprediksi, dampak *learning loss* terjadi pada siswa yang sedang belajar di bangku sekolah dasar (SD). Siswa kelas III SD yang melewatkan waktu belajar 6 bulan berpotensi kemampuannya tertinggal 1,5 tahun. Kemudian siswa kelas I SD yang tidak belajar dalam waktu 6 bulan berpotensi kemampuannya tertinggal 2,2 tahun. Kemampuan belajar itu kelak berdampak di masa-masa mendatang.

Salah satunya ialah dampak masalah ekonomi. Menurut Kaffenberger, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 1,5 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 15% saat dewasa. Sementara itu, siswa yang kehilangan kesempatan belajar selama 2 tahun akan kehilangan pendapatan sebesar 20% saat dewasa (sumber: kalderanews.com,

Sambungan hal 1

26/2/2021). Terlepas dari akurat tidaknya prediksi Kaffenberger itu, dampak *learning loss* perlu dicariarung solusinya.

Solusi pertama, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di pusat dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) di daerah perlu melakukan pemetaan kondisi siswa. Tiap-tiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Ada daerah yang sinyal internetnya kuat, ada pula daerah yang sinyal internetnya lemah. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam sistem PJJ.

Solusi kedua, pihak Kemendikbudristek dan Disdikpora perlu melakukan pengembangan mutu guru agar dapat mengajar PJJ dengan baik. Yang terjadi selama ini, guru banyak memberikan materi kepada siswa sehingga siswa cepat bosan belajar. Untuk itu, guru perlu menerapkan metode *Flipped Classroom* yang menggabungkan aspek *asynchronous* dan *synchronous* secara efektif. Di tahap *asynchronous*, siswa belajar secara individu di luar kelas atau di luar rumah.

Kemudian di tahap *synchronous*, pembelajaran di dalam kelas, baik daring/PJJ maupun luring/tatap muka, digunakan untuk aktivitas kolaborasi aktif dari tiap-tiap siswa. Jika siswa senang dalam belajar, kelak ia dapat mencapai penalaran ting-

Sambungan hal 1

kat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*, HOTS). Terkait itu, model pembelajaran yang tepat adalah *project based learning* (PjBl), antara lain, presentasi, diskusi, bedah kasus, atau debat ilmiah.

Solusi ketiga, perlunya para guru memiliki pola pikir yang berkembang. Selama ini, jujur saja, belum banyak guru yang melek akan teknologi digital. Saat pandemi Covid-19 merebak, barulah para guru belajar memakai Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Untuk itu, saatnya para guru memiliki pola pikir yang berkembang seiring kemajuan zaman. Saatnya para guru melek teknologi digital dan memanfaatkannya demi pembelajaran di kelas.

Ketiga solusi di atas mudah-mudahan dapat mengatasi *learning loss* yang terjadi saat ini. Kolaborasi antara Kemdikbudristek, Disdikpora, sekolah/guru, dan orangtua siswa perlu digagas untuk terus meminimalisasi penurunan mutu pendidikan. Seperti kata Ki Hadjar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Selama masa pandemi, orang tua di rumah menjadi guru bagi anak-anaknya. Dan, rumah menjadi sekolah yang menyenangkan.

(Penulis adalah Dosen PBSI FKIP UAD; Mahasiswa S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa FBS UNY)-d

23 Pelaku

kejahatan jalanan menurut Kapolres Bantul, perlu lebih ditingkatkan kegiatan Siskamling di masing-masing wilayah. Dari berbagai kasus kejahatan tersebut, ada beberapa pasal KUHP dan UU RI yang bakal dikenakan kepada para pelaku, di antaranya pasal 2 UU Darurat RI No 12 Th 1951 dan pasal 170

Sambungan hal 1

KUHP, ancaman hukumannya antara 6 tahun hingga 20 tahun. Kapolres Bantul menjelaskan, polisi akan meningkatkan kewaspadaan, termasuk upaya pencegahan peredaran narkoba yang sangat berpengaruh terhadap generasi muda. (Jdm)-d

Presiden

Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi. "Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha, akan terus saya pimpin dan saya pastikan," ujarnya.

Dengan dinyatakannya masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh peraturan

Sambungan hal 1

pelaksanaan UU tersebut yang ada saat ini juga masih tetap berlaku. Presiden pun memberi kepastian kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. "Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," ucap Presiden. (Sim)-d

Pemerintah

OSS tetap berjalan dengan baik untuk melayani perizinan berusaha yang baru maupun yang mengajukan perpanjangan. Selanjutnya tentang Ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Menteri Dalam Negeri segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah, terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

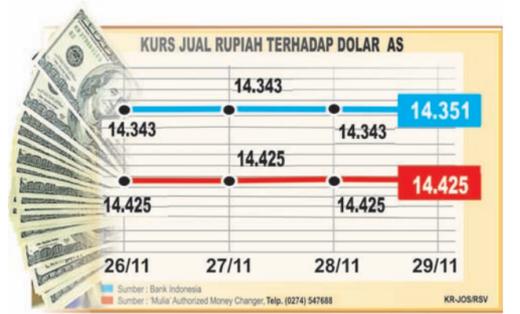
Pemerintah bersama DPR RI segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pascaputusan MK. Selanjutnya Pemerintah akan menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 (Daftar Kumulatif Terbuka Akibat Putusan MK).

Menambahkan penjelasan terkait implementasi UU Cipta Kerja, Menko Airlangga juga menyampaikan, BKPM telah mencatat kenaikan realisasi in-

Sambungan hal 1

vestasi pada 2021 sebesar 7,8 persen (YoY Januari-September) dengan nilai investasi Rp 659 triliun. Jumlah penciptaan kesempatan kerja baru sebanyak 912.402 tenaga kerja untuk Triwulan I-III Tahun 2021, dimana pada Triwulan I sebanyak 311.793 tenaga kerja, di Triwulan II 311.922 naker, dan Triwulan III 288.687 naker. OSS juga telah mener-

bitkan 379.051 perizinan berusaha untuk periode 4 Agustus-31 Oktober 2021, dimana perizinan berusaha yang dominan diberikan kepada usaha mikro sebanyak 357.893 perizinan (94,42 persen), usaha kecil 14.818 perizinan (3,91 persen), usaha menengah 3.783 perizinan (1 persen), dan usaha besar sebanyak 2.557 perizinan (0,67 perizinan). (Fie)-d



Prakiraan Cuaca Selasa, 30 November 2021

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	60-95
Sleman					22-30	65-95
Wates					23-31	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-31	60-95

Cerah Berawan Udara Kabur Hujan Lokal Hujan Pelir

Grafis: Arko

Mengenal Sudut Pandang Kritis dari Pembahasan Tentang Tenaga Kerja Tidak Tetap



Wiwid Adiyanto

Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

Persoalan tenaga kerja tidak tetap di Indonesia seakan menjadi permasalahan yang pelik dan belum mendapatkan jawaban yang memadai sampai hari ini. Tenaga kerja tidak tetap tersebar dalam berbagai sektor, termasuk pada sektor pendidikan. Permasalahan tenaga kerja tidak tetap ini berkembang dan memunculkan lebih banyak status kepegawaian yang biasa dijumpai di suatu perusahaan ataupun instansi

pendidikan. Namun seakan menjadi hal yang tabu, pembahasan terkait permasalahan ini belum banyak ditemukan dalam ranah publik secara transparan. Survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipublikasikan oleh situs Databook Katadata menunjukkan bahwa masih terdapat 937.228 guru tidak tetap yang tercatat di tahun 2020. Jumlah tersebut belum termasuk dosen yang melaksanakan tridarma dalam lingkup universitas. Hal itu menjadi suatu urgensi mengingat status dalam pekerjaan juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kepastian akan karir bagi individu yang terlibat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, "lalu bagaimana dengan kompetensinya?". Kompetensi bukan satu-satunya faktor penentu status tenaga kerja. Terdapat faktor

struktur atau sistem yang tidak jarang luput dalam pembahasan. Status kepegawaian yang awalnya tetap dan honorer, kini muncul PPPK untuk instansi negeri. Tidak hanya instansi negeri, fenomena itu pun terjadi pada ranah swasta. Misalnya ada status dosen tetap khusus dalam lingkup universitas yang istilahnya bisa beragam di setiap instansi. Alih-alih menjadi jalan tengah, status semacam itu masih menciptakan kesenjangan dalam lingkup instansi. Tidak menutup kemungkinan, permasalahan status tersebut merambat menjadi persoalan komunikasi dalam suatu instansi. Hal itu dikarenakan adanya kesenjangan dalam instansi tersebut. Belum lagi ketika kita berbicara status honorer. Adanya orang-orang yang membangun instansi bersama, melakukan



pekerjaan yang sama, namun tidak mendapatkan akses yang sama. Meminjam istilah dari tokoh Mahzab Frankfurt School dalam studi Ilmu Komunikasi, orang-orang yang tidak mendapatkan akses yang sama itu adalah pihak yang tertindas. Satu sisi, sistem seperti itu menguntungkan suatu instansi. Namun di sisi lain, ketidakadilan dan ketidaksetaraan terlihat antara individu berstatus pegawai tetap sejati atau inti, dan dengan yang selain itu. Individu cenderung akan menyampaikan pesan melalui sudut pandangannya. Sudut pandang itu di dapat berdasarkan posisi seorang individu tersebut.

Kelompok terpinggirkan tidak hanya dipaksa untuk mengembangkan sudut pandang mereka sendiri dari posisi yang kurang istimewa, tetapi juga diwajibkan untuk memahami sudut pandang yang lebih kuat. Setidaknya itu yang digambarkan oleh Sandra Harding dan Julia T. Wood melalui Standpoint Theory. Kita mungkin lebih banyak mendengar suara dari orang-orang "tinggi" di ranah publik. Atau orang-orang yang sudah dianggap sukses. Namun, bagaimana dengan suara orang-orang biasa? Atau suara dari sudut pandang orang-orang yang "tertindas" itu? Apakah suara orang-orang tersebut terasa mengganggu? Pierre Bourdieu, seorang filsuf asal Prancis berpendangan bahwa bahasa itu tidak pernah netral. Permasalahan dan pembahasan singkat di atas ditulis dengan pendekatan sudut

pandang atau paradigma kritis. Tentu saja sudut pandang ini bukan mereka sendiri dari posisi yang kurang istimewa, tetapi juga diwajibkan untuk memahami sudut pandang yang lebih kuat. Setidaknya itu yang digambarkan oleh Sandra Harding dan Julia T. Wood melalui Standpoint Theory. Kita mungkin lebih banyak mendengar suara dari orang-orang "tinggi" di ranah publik. Atau orang-orang yang sudah dianggap sukses. Namun, bagaimana dengan suara orang-orang biasa? Atau suara dari sudut pandang orang-orang yang "tertindas" itu? Apakah suara orang-orang tersebut terasa mengganggu? Pierre Bourdieu, seorang filsuf asal Prancis berpendangan bahwa bahasa itu tidak pernah netral. Permasalahan dan pembahasan singkat di atas ditulis dengan pendekatan sudut

pandang atau paradigma kritis. Tentu saja sudut pandang ini bukan mereka sendiri dari posisi yang kurang istimewa, tetapi juga diwajibkan untuk memahami sudut pandang yang lebih kuat. Setidaknya itu yang digambarkan oleh Sandra Harding dan Julia T. Wood melalui Standpoint Theory. Kita mungkin lebih banyak mendengar suara dari orang-orang "tinggi" di ranah publik. Atau orang-orang yang sudah dianggap sukses. Namun, bagaimana dengan suara orang-orang biasa? Atau suara dari sudut pandang orang-orang yang "tertindas" itu? Apakah suara orang-orang tersebut terasa mengganggu? Pierre Bourdieu, seorang filsuf asal Prancis berpendangan bahwa bahasa itu tidak pernah netral. Permasalahan dan pembahasan singkat di atas ditulis dengan pendekatan sudut